

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi salah satu masalah yang ada di perkotaan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang pada awalnya lahan tersebut digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian, tetapi saat ini mayoritas lahan digunakan untuk kegiatan industri, pemukiman warga hingga perkantoran. Masalah lain yang timbul pada wilayah perkotaan yakni adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat ditandai dengan beban masyarakat yang semakin tinggi akibat kenaikan kebutuhan hidup terhadap pangan, dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemiskinan di kota juga semakin meningkat (Elvaretta, *et al.*, 2024)

Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah yang cukup krusial di bidang pertanian. Peningkatan populasi penduduk juga menyebabkan pemukiman semakin bertambah dan beriringan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat, adanya permasalahan pada lahan yang banyak di alih fungsikan menjadi pemukiman tersebut, menyebabkan permasalahan besar di sektor pertanian karena semakin bertambahnya pemukiman maka semakin terbatasnya lahan pertanian yang digunakan untuk melakukan kegiatan di sektor pertanian. Kelaparan, kemiskinan, hingga kekurangan gizi menjadi salah satu sebab dari kepadatan penduduk dan wilayah Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dan dengan adanya hal tersebut, pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih. Karena kepadatan penduduk yang semakin padat memiliki dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Fitri, *et al.*, 2021)

Tabel 1. 1 Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (per km^2) ⁵	
	2020 ¹	2020 ²	2020 ¹	2020 ²
Kediri	0,71	0,70	4.524	4.305
Blitar	0,37	0,37	4.579	4.577
Malang	2,07	2,06	5.808	7.617
Probolinggo	0,59	0,59	4.229	4.448
Pasuruan	0,51	0,51	5.894	5.424
Mojokerto	0,33	0,33	6.553	6.645
Madiun	0,48	0,48	5.754	5.514
Surabaya	7,07	7,02	8.200	8.595
Batu	0,52	0,53	1.558	1.116

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel 1.1 menurut data BPS 2023, Kota Surabaya menempati kota dengan tingkat presentase penduduk dan kepadatan penduduk nomor 1 yang paling tinggi di Jawa Timur dengan total kepadatan penduduk yakni pada tahun 2020 sebesar $8.200/ km^2$)⁵, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni sebesar $8.595/ km^2$)⁵. Menurut Christiani *et al.*, (2014), kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada banyaknya permasalahan seperti semakin terbatasnya lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman hingga semakin minimnya lapangan pekerjaan akibat dari semakin bertambahnya populasi masyarakat di perkotaan. Akibat dari bertambahnya populasi secara terus-menerus mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian sehingga menyebabkan masalah ekologi. Bencana krisis pangan juga dapat terjadi akibat dari tidak teraturnya pertambahan populasi masyarakat di wilayah perkotaan (Fauzi, *et al.*, 2016). Adanya kepadatan penduduk tersebut juga menyebabkan semakin berkurangnya lahan yang digunakan pada sektor pertanian.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kecamatan Hasil Registrasi di Kota Surabaya (jiwa), 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Karangpilang	75.503	-0,09
Jambangan	54.212	0,02
Gayungan	43.846	-0,35
Wonocolo	80.034	0,06
Tenggilis Mejoyo	58.932	-0,10
Gunung Anyar	62.342	1,26
Rungkut	123.65	1,40
Sukolilo	115.91	0,71
Mulyorejo	88.214	0,75
Gubeng	132.38	-1,06
Wonokromo	153.56	-0,92
Dukuh Pakis	59.345	-0,31
Wiyung	76.501	1,48
Lakarsantri	65.013	1,48
Sambikerep	69.076	1,67
Tandes	91.784	-0,15
Sukomanunggal	104.16	-0,59
Sawahan	198.51	-0,41
Tegalsari	97.511	-0,82
Genteng	58.216	-0,90
Tambaksari	227.02	0,01
Kenjeran	185.29	2,20
Bulak	47.839	1,61
Simokerto	92.057	-0,68
Semampir	183.29	0,51
Pabean Cantian	73.931	-0,75
Bubutan	96.704	-0,58
Krembangan	114.86	-0,39
Asemrowo	48.841	1,71
Benowo	74.933	2,22
Pakal	64.515	2,87
Kota Surabaya	3.018.02	0,29

Sumber: Data BPS, 2025

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Surabaya sangat tinggi dan hal tersebut akan menjadi kendala di sektor pertanian karena akan adanya keterbatasan lahan yang dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk. Pada data diatas dijelaskan bahwa jumlah total penduduk di Kota Surabaya adalah 3.018.022 (jiwa), dimana jumlah tersebut dikatakan sangat tinggi

dan juga di beberapa kecamatan yang berada di Kota Surabaya memiliki laju pertumbuhan penduduk dengan nilai positif dan meningkat sebesar 0,29% pada tahun 2024. Tingginya penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan meningkatnya juga persaingan dalam mendapatkan pekerjaan khususnya jika pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di kota tersebut. Ketika kesempatan bekerja semakin menipis, maka banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di sektor dengan pendapatan rendah hingga menjadi pengangguran, dengan adanya kondisi tersebut maka kebutuhan rumah tangga juga akan tidak tercukupi dengan baik sehingga memicu adanya kemiskinan.

Beberapa dekade terakhir ini pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan pangan secara signifikan, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan tidak selalu mampu mengimbangi laju tersebut. Kondisi ini menimbulkan persaingan kerja yang semakin ketat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya memperbesar risiko kemiskinan. Ketika pendapatan terbatas dan harga pangan terus meningkat, banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk asupan gizi yang layak dan hal tersebut dapat memperparah kemiskinan.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surabaya

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya (Ribuan Jiwa)		
	2022	2023	2024
Kota Surabaya	138,21	136,37	116,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel 1.3 terdapat data jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya, terlihat pada data tingkat kemiskinan di Kota Surabaya cukup tinggi yaitu pada tahun 2022 berjumlah 138,21, di tahun 2023 berjumlah 136,37, dan di tahun 2024

berjumlah 116,62. Seiring berjalannya waktu, tingkat kemiskinan di Kota Surabaya semakin berkurang tetapi masih terbilang tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya permasalahan mengenai keterbatasan lahan hingga kemiskinan yang semakin merambat di wilayah Kota Surabaya ini, Dinas Pertanian Kota Surabaya membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 yang berisi mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya 2014-2023. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan masyarakat miskin kota dapat membangun kemandirian pangan melalui program *urban farming*, dan hingga sekarang program tersebut terus dijalankan karena memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi dan kebutuhan gizi masyarakat perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yakni melalui ketahanan pangan, dimana ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhi pangan secara cukup maupun aman, beragam, bergizi, merata dan tidak bertentangan dengan agama, budaya, hingga keyakinan dengan tujuan masyarakat dapat hidup sehat, produktif, hingga berkelanjutan (Pasal 1 angka 4)

Tabel 1. 4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota

Kode Kab/Kota	Nama Kabupaten	Tahun	IKP	Peringkat Kab/Kota	Kelompok
3578	Kota Surabaya	2018	84.44	7	6
3578	Kota Surabaya	2019	81.67	31	6
3578	Kota Surabaya	2020	84.71	9	6
3578	Kota Surabaya	2021	85.25	14	6
3578	Kota Surabaya	2022	81.59	25	6
3578	Kota Surabaya	2023	92.14	6	6
3578	Kota Surabaya	2024	93.06	-	6

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Pada Tabel 1.4 Indeks Ketahanan Pangan di Kota Surabaya mulai dari tahun 2018-2024 terdapat di kelompok 6 yang artinya sangat tahan. Tetapi pada faktanya, meskipun indeks ketahanan pangan di Kota Surabaya terbilang sangat tahan, tetapi kemiskinan di Kota Surabaya juga terbilang cukup tinggi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya karena masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini berdampak langsung pada ketahanan pangan, karena keterjangkauan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketahanan pangan. Menurut DKP dan WFP (2013) ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar khususnya pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Solusi yang tepat untuk permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yakni melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan (Sitawati dan Elih, 2022).

Sektor pertanian menjadi perhatian khusus dalam pembangunan nasional karena sektor pertanian menyangkut pangan. Produk hasil pertanian sebaiknya dilakukan secara strategis dan juga optimum (Isbah, 2016). Negara Indonesia juga merupakan negara agraris yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap negara. Saat ini sektor pertanian tidak hanya di wilayah pedesaan tetapi di wilayah perkotaan dan hal tersebut dapat menjadi peluang di sektor pertanian khususnya di wilayah perkotaan seperti halnya pertanian perkotaan atau *urban farming*.

Urban farming merupakan salah satu program yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan, dan diharapkan kemiskinan di perkotaan juga semakin menurun sehingga pemenuhan kebutuhan

pangan juga akan tercukupi dengan optimal. Program *urban farming* juga diharapkan dapat mengurangi taraf kemiskinan masyarakat perkotaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar pada tiap individu. Upaya pemerintah untuk dapat merespon berbagai permasalahan yang ada di Kota Surabaya salah satunya yakni melalui kebijakan adanya program *urban farming* (Athariyanyo, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Slabinski yang mengatakan bahwa *urban farming* dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang memiliki masalah perekonomian, selain memanfaatkan lahan kosong menjadi berguna, *urban farming* juga memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat perkotaan (Suwarnata, *et al.*, 2021). Peningkatan ekonomi, penataan lingkungan, mempertahankan sosial budaya masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan *urban farming* (Setyo, *et al.*, 2019).

Urban farming dapat dikatakan merupakan salah satu pengembangan teknologi baru di sektor pertanian karena sistem budidayanya meliputi hidroponik, aeroponik, hingga sensor tanaman yang dapat menciptakan ekonomi baru dan menambah inovasi di perkotaan. Menurut Suardana *et al.*, (2020) Pertanian perkotaan dapat dikatakan menjadi solusi di wilayah perkotaan karena budidaya dapat dilakukan di lahan-lahan sempit. Konsep *urban farming* dirancang agar masyarakat perkotaan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang sehat. *Urban farming* juga dioptimalkan di wilayah perkotaan agar dapat berkontribusi pada aspek ekologi dan ketahanan pangan perkotaan (Krisnawati, *et al.*, 2016).

Urban farming juga dapat mengentaskan permasalahan pada aspek sosial karena permasalahan di bidang sosial, seperti halnya permasalahan yang cukup umum yakni pengangguran, kesehatan, hingga malnutrisi, dengan adanya *urban*

farming maka dapat diatasi dengan adanya pembentukan komunitas atau dapat dikatakan kelompok tani untuk menciptakan ruang pertemuan (Sitawati, 2019), dengan adanya *urban farming* juga dapat meningkatkan interaksi sosial bagi masyarakat kota sehingga terdapat hubungan yang harmonis pada setiap masyarakat di perkotaan. Menurut Armasyah (2024) *urban farming* berperan dalam aspek ekonomi karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota sehingga memperoleh pendapatan. Selain itu, *urban farming* berdampak positif untuk mengecilkan pengeluaran rumah tangga khususnya pada kebutuhan dasar pada rumah tangga.

Urban farming berkontribusi positif dalam mengatasi berbagai masalah perkotaan penyediaan berkelanjutan, pangan seperti termasuk yang mitigasi dampak ekologis akibat eksploitasi sumberdaya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Alfariza, *et al.*, 2023). Selain itu *urban farming* juga memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan (Syabrina, *et al.*, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, FAO (2018) mengatakan bahwa sistem pangan berkelanjutan merupakan sistem yang bergerak beriringan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga berdampak positif bagi keamanan pangan. Sistem pangan berkelanjutan juga berdampak positif bagi aspek ekonomi yakni pada keuntungan yang diperoleh, aspek sosial yakni manfaat bagi masyarakat perkotaan, dan juga pada aspek lingkungan. *Urban farming* berperan penting dalam menciptakan kota yang lebih tangguh melalui penyediaan pangan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan secara terpadu untuk mencapai keberlanjutan dalam *urban farming* (Sugihartini, *et al.*, 2023).

Pertanian perkotaan memiliki dampak positif yang kompleks baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, hingga aspek lingkungan. Kerawanan pangan pada wilayah perkotaan dapat diatasi dengan adanya pertanian perkotaan karena dapat memangun sisyem pangan yang berkelanjutan (Haletky, 2006). Kompleksnya permasalahan di perkotaan mulai dari kemiskinan hingga kebutuhan pangan meningkat dapat diatasi menggunakan alternatif pertanian perkotaan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, pertanian perkotaan memiliki pengaruh baik jika dikembangkan di wilayah perkotaan.

Permasalahan yang timbul pada perkotaan tersebut, mulai dari kepadatan penduduk yang menyebabkan berkurangnya lahan untuk pertanian di Kota Surabaya serta berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan tingginya kemiskinan di Kota Surabaya, serta permasalahan lingkungan dan sosial pada masyarakat perkotaan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) terhadap keberlanjutan pangan perkotaan di Kota Surabaya, dengan menganalisis pengelolaan *urban farming* ditinjau dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial, serta tahap akhir adalah merumuskan prioritas pengelolaan *urban farming* untuk keberlanjutan pangan perkotaan di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Kota Surabaya menghadapi berbagai permasalahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri. Hal ini menyebabkan keterbatasan lahan, berkurangnya ruang hijau, serta krisis pada sektor pertanian perkotaan.

Selain itu, kepadatan penduduk yang terus meningkat memicu persaingan kerja, pengangguran, dan meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berdampak pada ketimpangan sosial dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Konversi lahan memperburuk kerusakan ekologi dan menurunkan kapasitas kota dalam menciptakan sistem pangan mandiri, hal tersebut merupakan permasalahan dari aspek lingkungan. Secara ekonomi, pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan lapangan kerja, menyebabkan rendahnya pendapatan dan tingginya risiko kemiskinan. Secara sosial, kurangnya ruang interaksi dan lemahnya keterlibatan komunitas memperbesar kesenjangan dan melemahkan kohesi sosial.

Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendorong *urban farming* melalui Perda No. 12 Tahun 2014. Program ini dinilai mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan interaksi sosial, serta menjaga keseimbangan ekologi secara berkelanjutan. Menurut FAO (2018), sistem pangan berkelanjutan adalah sistem yang memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua, tanpa mengorbankan dasar ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi mendatang, sehingga *urban farming* menjadi langkah strategis yang sejalan dengan tujuan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek lingkungan dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya?

2. Bagaimana aspek ekonomi dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya?
3. Bagaimana aspek sosial dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya.?
4. Bagaimana prioritas pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) untuk keberlanjutan pangan perkotaan di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis aspek lingkungan dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya
2. Menganalisis aspek ekonomi dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya.
3. Menganalisis aspek sosial dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Surabaya.
4. Merumuskan prioritas pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) untuk keberlanjutan pangan perkotaan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini digunakan menjadi saran untuk mengintegrasikan antara pengetahuan yang diperoleh di masa perkuliahan dan diterapkan di praktik nyata. Selain itu, penyusunan skripsi ini dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas akademik dan profesional di masa yang akan datang.

2. Bagi Kelompok Tani *Urban Farming*, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang lebih luas, serta memberikan informasi praktis yang relevan dalam pengelolaan *urban farming* secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, keberhasilan usaha, hingga efisiensi yang dapat mendukung ketahanan dan kemandirian pangan di lingkungan perkotaan.
3. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini berdampak sebagai referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademik dalam kegiatan pembelajaran hingga pengajaran. Analisis dalam penelitian ini juga menjadi dasar pertimbangan untuk program pengabdian masyarakat.